

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup seseorang haruslah bekerja, baik bekerja secara mandiri atau berwirausaha maupun bekerja menjadi karyawan suatu perusahaan. Sedangkan siklus kehidupan manusia di dunia dimulai dari kelahiran, masa anak-anak, masa remaja, masa menjelang dewasa, masa dewasa, masa tua dan diakhiri dengan kematian. Semua manusia tidak akan pernah terlepas dan menghindari siklus tersebut.

Konsekuensi logis dari siklus tersebut adalah bahwa seseorang tidak dapat bekerja sepanjang hayat untuk mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya. Faktor keterbatasan usia yang menjadikannya tidak mampu bekerja produktif lagi. Dengan adanya keterbatasan usia untuk bekerja sedangkan kebutuhan hidup harus terus dicukupi sampai akhir hayat maka diperlukan suatu program ataupun pengambilan langkah agar kebutuhan tetap dapat tercukupi walaupun sudah tidak bekerja lagi.

Salah satu program yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan di hari tua adalah program tunjangan hari tua atau yang lebih dikenal dengan program pensiun. Program tersebut menjadi dambaan setiap karyawan di suatu instansi atau perusahaan. Dengan adanya program tersebut diharapkan kesejahteraan karyawan akan tetap didapat dan kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya dapat tercukupi walaupun karyawan tersebut telah

purna karya karena usia maupun disebabkan oleh faktor tertentu, semisal berhenti bekerja karena adanya kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat bekerjanya karyawan tersebut.

Sudah menjadi persepsi masyarakat secara umum bahwa yang dapat ikut serta di program pensiun hanya golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pandangan tersebut menyebabkan semua orang berlomba-lomba untuk mendaftar menjadi PNS maupun TNI dengan harapan akan tetap mendapatkan kesejahteraan dan tercukupinya kebutuhan pribadi maupun keluarganya di waktu sudah purna karya.

Pada tanggal 20 April 1992 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, semenjak itu Program Pensiun tidak hanya milik atau diikuti oleh PNS maupun TNI saja, para karyawan swasta maupun pekerja mandiri memperoleh kesempatan yang luas untuk mengikuti dan mendapatkan manfaat dari Program Pensiun. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 pasal 1 dijelaskan bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dijelaskan pula bahwa terdapat tiga jenis Dana Pensiun yaitu pertama Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dimana Dana Pensiun yang dapat didirikan oleh perorangan maupun badan/ perusahaan umum, kedua Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK) dan ketiga Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang hanya dapat didirikan oleh Bank Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa. Namun sampai dengan saat ini

hanya dua jenis dana pensiun yang berlaku yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Menurut Siswosudarmo (2013) apabila ditinjau dari kepentingan perusahaan atau pemberi kerja, tujuan penyelenggaraan dana pensiun memiliki dua aspek yang menguntungkan. Pertama aspek ekonomi dimana loyalitas dan kompetisi pasar tenaga kerja sangat berpengaruh. Dengan adanya Program Dana Pensiun diharapkan karyawan mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan, serta perusahaan akan mempunyai daya saing dan nilai lebih dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di dunia pasar tenaga kerja. Kedua aspek sosial perihal kewajiban moral, dimana perusahaan berkewajiban secara moral memberikan rasa aman kepada seluruh karyawan beserta keluarganya pada saat purna karya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada karyawan tidak hanya pada saat karyawan tersebut tidak mampu bekerja, tetapi juga kepada keluarga karyawan pada saat karyawan tersebut meninggal dunia.

Maryono (2010) mengemukakan bahwa sebuah dana pensiun sebagai sebuah badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 mempunyai tugas dan fungsi mengelola serta menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sistem pendanaan program pensiun dilakukan dengan melakukan iuran dari anggota maupun dari pendiri, yang kemudian di investasikan dalam beberapa instrumen investasi yang memungkinkan terbentuknya dana yang cukup guna pembayaran manfaat pensiun kepada anggota.

Dengan demikian sebuah Dana pensiun mempunyai tiga tugas utama dalam mengelola Program Pensiun. Tugas pertama adalah menghimpun dana yang berasal dari iuran anggota maupun pendiri. Tugas yang kedua mengelola dana yang berasal dari anggota maupun pendiri dengan jalan menginvestasikan dana sehingga dana tersebut dapat berkembang. Sedangkan tugas yang ketiga adalah membayarkan manfaat pensiun kepada peserta yang telah memenuhi syarat.

Pada tahun 2011 Pemerintah melalui Undang-undang No. 21 tahun 2011 membentuk sebuah lembaga negara yakni Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan menggantikan peran Bapempam-LK. Sehingga praktis dengan dibentuknya lembaga tersebut pengaturan dan pengawasan dana pensiun berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan.

Investasi merupakan salah satu jenis kegiatan di dalam Dana Pensiun yang bertujuan untuk mengembangkan dana yang berasal dari anggota maupun pendiri. Investasi yang dilakukan terhadap dana yang terkumpul haruslah sesuai dengan arahan atau kebijakan investasi dari Pendiri Dana Pensiun. Selain hal tersebut harus sesuai pula dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.005/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun diberikan kepada peserta Dana Pensiun yang telah purnakarya karena usia, meninggal dunia, cacat atau alasan lain

yang sesuai dengan peraturan. Dalam hal pembayaran manfaat pensiun kepada peserta pensiun meninggal dunia maka manfaat pensiun diberikan kepada istri, anak, atau ahli waris yang ditunjuk. Dengan demikian perhitungan manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu didalam kondisi masa depan yang tidak pasti dan sulit diestimasi. Oleh karenanya sebuah Dana Pensiun haruslah mempunyai kecukupan pendanaan dalam rangka memberikan manfaat pensiun baik dalam kondisi sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "PENDANAAN DANA PENSIUN PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI." (Studi Kasus Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi pendanaan di Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menggunakan Program Pensiun Manfaat Pasti?
2. Bagaimana kecukupan pendanaan di Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menggunakan Program Pensiun Manfaat Pasti dalam memberikan manfaat pensiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi pendanaan di Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menggunakan Program Pensiun Manfaat Pasti
2. Mengetahui kecukupan pendanaan di Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menggunakan Program Pensiun Manfaat Pasti dalam memberikan manfaat pensiun

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peserta Dana Pensiun

Dengan diketahui kondisi dan kecukupan pendanaan Dana Pensiun, maka diharapkan peserta dana pensiun dapat mengetahui tentang jumlah dana dari Dana Pensiun tersebut. Sehingga peserta mengetahui tentang sehat atau tidaknya kondisi dana dan secara tidak langsung dapat meminimalisir rasa kekhawatiran terhadap pembayaran manfaat pensiun.

2. Bagi Pemberi Kerja

Dengan diketahuinya kondisi dan kecukupan pendanaan Dana Pensiun, maka diharapkan Pemberi Kerja mempunyai gambaran tentang situasi yang terjadi di dalam Dana Pensiun tersebut, khususnya di bidang

pendanaan, sehingga akan memudahkan dalam mengambil suatu kebijakan.

3. Bagi Pemerintah

Dapat mengetahui kondisi dan kecukupan Pendanaan Dana Pensiun, maka Pemerintah dapat menyimpulkan tentang sehat atau tidaknya Dana Pensiun tersebut sehingga akan memudahkan dalam melakukan pengawasan maupun mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi kelangsungan Dana Pensiun.

4. Bagi Penulis

Dengan mengadakan penelitian seperti ini penulis mengerti pada permasalahan yang ada meskipun belum sempurna, tetapi penulis akan lebih mendapatkan pengetahuan yang bertambah mengenai Pendanaan Dana Pensiun..

5. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar sumber informasi bagi penelitian yang akan datang, serta dapat dijadikan untuk membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain selama perkuliahan dan dapat mengembangkan daya fikir yang sistematis.

E. Sistematika Penelitian

Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian ini maka akan diuraikan secara singkat isi dari masing-masing bab, sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan, akan dijelaskan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian. Selain hal tersebut akan dijelaskan pula perihal Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Pada Bab II Tinjauan Pustaka, akan menjelaskan secara garis besar tentang teori-teori yang mendasari penelitian. Teori-teori yang berhubungan dengan Dana Pensiun diantaranya: Pengertian Dana Pensiun, Laporan Keuangan Dana Pensiun, Laporan Aktuaris, Teori dan Konsep Dana Pensiun serta Tinjauan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Objek dan Waktu Penelitian, Jenis & Sumber Data. Disamping itu disampaikan pula perihal Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Analisa Data yang digunakan dalam menyusun penelitian.

Bab IV Analisis dan Pembahasan, secara garis besar berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian dan Pembahasan Masalah. Dalam Deskripsi Penelitian diuraikan tentang gambaran umum Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta yang meliputi sejarah singkat, struktur organisasi serta pedoman teknis.

Dalam Pembahasan Masalah akan membahas tentang kondisi dan kecukupan pendanaan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasar pada Laporan Keuangan, Laporan Aktuarial serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 510/KMK.06/2002 perihal Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja serta peraturan perubahannya yakni Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2012.

Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini berisikan pernyataan singkat dari hasil analisis penelitian yang berupa kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian yang kiranya dapat bermanfaat bagi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta.